



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Sarat Dikorupsi

### Draft APBD 2020

**JAKARTA** - Draft anggaran APBD 2020 Pemprov DKI disinyalir rawan dikorupsi. Itu terbukti banyaknya kegiatan yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) ditemukan banyak anggaran yang janggal.

"Karena proyeksi anggaran dari awal sangat tertutup. Potensi bancakan jelas, dan terindikasi rawan dikorupsi. Karena tidak berprinsip efisiensi dan efektifitas dan sarat merugikan keuangan negara," kata Direktur Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Yenny Sucipto, Kamis (31/10/2019).

Yenny menambahkan, lep-



**Karena proyeksi anggaran dari awal sangat tertutup. Potensi bancakan jelas, dan terindikasi rawan dikorupsi".**

**Yenny Sucipto**

*Direktur Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran*

annya pengawasan itu dikarenakan karena DPRD mengalami proses transisi, sekitar bulan Juli 2019. Dewan ketika itu dianggap kurang serius, sehingga dimanfaatkan eksekutif. "Eksekutif memanfaatkan untuk memunculkan biaya anggaran yang tidak masuk akal. Karena memang lepas pengawasan," ujar dia ■

Menurut dia, sistem pengawasan anggaran yang lemah, maka tim anggaran pemerintah daerah lepas kontrol. Padahal, mereka kedudukannya sebagai leading sektor usulan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). "Tim anggaran yang seharusnya bertanggungjawab atas banyaknya masalah dalam usulan APBD 2020," tandas Yenny.

Sistem e-budgeting dinilai menjadi biang kerok, kata Yenny, sebenarnya bukan itu masalahnya. Sebab, sistem yang sudah dibangun di era Ahok menjadi gubernur, sudah optimal. Hanya bila ditemukan kelemahan dalam sistem itu, seharusnya diperbaiki, bukan malah harus dihapus. "Sistem e-Budgeting sudah terbuka, kalau memang ada kelemahan harus diperbaiki," imbuh dia.

Sejauh ini, sistem e-budgeting yang ada, mendapat pengawasan masyarakat yang tinggi. Hanya saja, untuk tingkat pelaksanaan hanya bisa dilakukan oleh eksekutif. Bahkan, legislatif sendiri seperti diamputasi untuk melakukan pengawasan. "Seharusnya yang kelemahan seperti ini diperbaiki, biar pelaksanaannya bukan hanya eksekutif saja, dewan dan masyarakat juga bisa," tambah dia.

Atas polemik ini, diakui Yenny, bisa saja finalisasi APBD 2020 molor. Apalagi, nota kesepakatan KUA PPAS saja belum selesai pada November 2019. "Karena setelah ini kan masih ada beberapa pembahasan sebelum diketuk palu," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, selama ini dirinya tidak pernah membuka akses perencanaan anggaran 2020 atau Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara 2020. "Saya tidak pernah membuka akses itu," kata dia.

Dia mengaku, pihaknya tidak

pernah membuka akses KUA PPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. "Saya belum buka karena memang kita masih bahas. Setelah ini diketuk baru kami akan bahas," tandas dia.

### Rencana Rehab Puluhan Sekolah Menyusut

Sebanyak 86 lokasi sekolah akan dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang usulan awal yang mengajukan sebanyak 191 bangunan sekolah yang sudah harus direhab.

"Sekarang hanya 86 bangunan sekolah yang pada akhirnya diusulkan dari perencanaan 191 bangunan yang akan direhab. Sekarang tinggal mendapat persetujuan dari anggota dewan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, Kamis (31/10/2019).

Syaefuloh menambahkan, kategori rehabilitasi itu akan merobohkan seluruh bangunan dan baru dibangun baru. Tapi kata dia, ada juga yang bangunannya hanya diganti plafon atau hanya atapnya saja. Rencananya, proyek itu untuk seluruh bangunan SD, SMP dan SMA. "Setiap bangunan sekolah itu memakan biaya rehab yang berbeda, tergantung dari kapasitas sekolahnya," kata dia.

Selain itu, dia memastikan pihaknya juga akan membangun pagar yang baru, rumput sintetis, pemasangan solar panel dan fasilitas lainnya. Anggaran rehab total itu masuk dalam kategori peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. "Usulan anggaran rehab gedung sekolah diusulkan sebesar Rp2,1 triliun," beber dia.

Meski begitu, kata Syaefuloh, total usulan anggaran dari Dinas Pendidikan yang diajukan pada 2020 sebesar Rp23 triliun. Usulan dana sebesar itu, diakui dia, naik dari tahun anggaran sebelumnya

yang hanya Rp 21 triliun. Tapi, menurut dia, usulan itu bisa saja berubah tergantung persetujuan pemegang kebijakan anggaran dalam hal ini DPRD.

"Kami sudah melakukan pantauan dan menelusuri bangunan sekolah mana yang sangat urgen untuk direhabilitasi. Kami ingin pastikan bahwa tidak akan membahayakan murid. Termasuk usulan kami ini berpedoman dari Dinas Cipta Karya," kata Syaefuloh.

Sementara itu, Ketua Komisi E (bidang pendidikan) DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait khususnya yang mengepalai Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan paham betul soal seluk beluk pengeluaran untuk rehab total bangunan sekolah itu. Agar hal ini tidak dikelabui oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Jangan sampai baru dua tahun gedung sekolah dibangun, lalu direhab lagi. Kalau bisa kepala bidang ini dari insinyur biar paham," tandas dia singkat.

### BOP Numpang di Pos Pengadaan ATK

Lantaran hal sepele, anggaran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang ditempatkan menumpang pada pos pengadaan ATK. Mengakibatkan bengkaknya anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta 2020.

Diutarakan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Joko Sugiarto merujuk pada tenggat penyerahan pengajuan anggaran BOP yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2019 mendatang. Sedangkan, Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang menjadi dasar pengajuan BOP diterangkannya, belum seluruhnya diserahkan dari



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran Sarat Dikorupsi

masing-masing sekolah, baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Serupa dengan wilayah pendidikan lainnya, Sudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan, tambahnya, berinisiatif untuk mengalokasikan pengajuan anggaran BOP ke dalam pos pengadaan ATK lewat e-budgeting, [www.apbd.jakarta.go.id](http://www.apbd.jakarta.go.id). Sehingga, anggaran yang diajukan melambung tinggi. Dari semula sebesar Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar atau naik sebesar 756 persen.

"Jadi karena sudah deadline (tenggat) dimasukkanlah BOP itu ke dalam pos ATK, karena memang belum semua sekolah menyerahkan RKS, sementara anggaran BOP itu harus diinput ke dalam e-budgeting sebelum tanggal 30 Oktober (2019), soalnya kalau terlambat, BOP sekolah tidak turun," tandas dia dihubungi INDOPOS, Kamis (31/10/2019).

Kemudian, lanjut dia, pengadaan ATK Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan 2020 justru menurun, yakni sebesar Rp22,7 miliar dibandingkan 2019 yang mencapai Rp23,6 miliar. Kebutuhan ATK tersebut dijabarkannya meliputi Kantor Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan sebesar Rp150 juta, SD sebesar Rp10,45 miliar, SMP sebesar Rp4,7 miliar, SMA sebesar Rp5,2 miliar.

Selain itu, kebutuhan ATK pada tingkat SMK meliputi, SMK Jurusan Bisnis Manajemen sebesar Rp1,3 miliar, SMK Jurusan Pariwisata sebesar Rp 328 juta dan SMK Jurusan Teknologi sebesar Rp 471 juta. "Kalau dihitung itu kebutuhan ATK sebesar Rp 22,7 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp 180 miliar adalah alokasi anggaran BOP untuk RKS," tambah dia.

Joko menegaskan kembali, bengkaknya anggaran yang sebelumnya dibahas Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada tanggal 23 Oktober 2019 lalu itu bukan merupakan kesalahan input. Kenaikan pengajuan anggaran ATK dalam KUA PPAS dikarenakan titip pos anggaran. "Jadi bukan karena kesalahan input, memang karena titip pos anggaran BOP RKS ke dalam pos ATK," beber dia.

Bahkan, kata dia, hal ini juga sudah dijabarkannya kepada anggota DPRD DKI atas input yang dilakukan itu. "Sudah kami paparkan juga ke dewan tadi. Jadi di dewan juga sudah paham," tutur dia.

Temuan bengkaknya anggaran pengadaan ATK dalam KUA PPAS 2020 ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lewat penyisiran anggaran. Dia menuturkan, kepada seluruh pejabat untuk memotong bengkaknya anggaran agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya menyoroti beberapa hal, pertama kondisi perekonomian kita ini agak menantang ini sekarang, jadi kita harus benar-benar teliti atas apa yang kita masukkan ke dalam anggaran kita. Kemudian, di tahun 2020 ini dari catatan yang saya terima, prediksi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita ini akan mengalami pengurangan yang cukup signifikan," terang dia dalam tayangan Youtube saat memberikan Arahan Pembahasan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD TA 2020 di Balai Kota, Gambir, Jakarta pada Rabu (23/10/2019).

Bahkan, berkurangnya proyeksi SILPA dari semula sebesar Rp8,5 triliun yang berubah menjadi Rp3 triliun pada 2020 mengakibatkan perubahan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Sehingga

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyusun anggaran lebih rapih dan teliti.

"Ada penambahan anggaran baru yang muncul karena SKPD baru, kemudian peleburan SKPD, dan juga beberapa kegiatan prioritas yang belum masuk (diusulkan) ketika kita menyampaikan di bulan Juli (2019). Saya ingin semua itu dipastikan pasti masuk," harap Anies.

Sedangkan Anies pun mengusulkan agar dilakukan sejumlah pemotongan atas rencana kegiatan yang tidak relevan dan minim manfaat bagi masyarakat. Sebab, rancangan anggaran dalam pemerintahan berbeda dengan perusahaan yang berorientasi terhadap keuntungan.

Di pemerintahan khususnya, sambung Anies, tujuan penganggaran adalah merealisasikan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga seluruh kegiatan dan program yang disusun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan utama, yakni Keadilan sosial.

"Sehingga kalau anggaran pemerintah itu jangan dilihat berapa untungnya. Tetapi begini, siapa? dapat apa? berapa besar? kapan? di mana?, itu yang harus dijawab. Dari sini itu bisa dilihat, mencapai tujuan utama atau tidak?," tambah Anies.

Hal tersebut dibuktikannya dalam sejumlah tabel pengajuan anggaran yang diajukan dalam KUA PPAS tahun anggaran 2020. Dalam sejumlah laporan tersebut dijabarkan sejumlah anggaran yang membengkak, khususnya yang berasal dari Dinas pendidikan DKI Jakarta, seperti pengadaan ATK yang meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,654 triliun pada tahun 2020.

Hal tersebut juga ditunjukkan Anies dari jumlah anggaran operasional yang membengkak, antara lain Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen dari semula Rp12,3 miliar menjadi Rp43 miliar, Sudin pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen dari semula Rp17,3 miliar menjadi Rp74,8 miliar, Sudin pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen dari semula Rp22,8 miliar menjadi Rp103,5 miliar, Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen dari semula Rp25,7 miliar menjadi Rp134,1 miliar.

Selanjutnya, Sudin pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen dari semula Rp19,5 miliar menjadi Rp136,3 miliar, Sudin pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen dari semula Rp25,9 miliar menjadi Rp201,9 miliar, Sudin pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen dari semula Rp23,6 miliar menjadi Rp202 miliar, Sudin pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen dari semula Rp43 miliar menjadi Rp303,2 miliar dan tertinggal Sudin pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen dari semula Rp35,9 miliar menjadi Rp337 miliar.

"Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp1 miliar ya. Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi tujuan yang maha kuasa. Tidak bisa," pungkask dia. (dny/ibl)